

ANALISIS PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DARI KURIKULUM 2013 KE KURIKULUM MERDEKA

Yanti Puspita^{1*)}, Cucu Atikah²⁾

^{1,2}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa – Kota Serang
Email: 7772220005@untirta.ac.id¹⁾; cucuatikah@untirta.ac.id²⁾
) Korespondensi: 7772220005@untirta.ac.id

Naskah diterima: 15 Januari 2023 – disetujui: 04 April 2023

ABSTRAK

Kurikulum ini mengedepankan pembelajaran yang menyenangkan tanpa beban. Setiap pembelajaran dituntut berdiferensiasi agar anak terakomodasi keberagaman minat dan bakatnya. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (studi literatur). Teknik pengumpulan data melibatkan pencarian informasi terkait fokus penelitian melalui catatan, buku, artikel ilmiah dan sumber relevan lainnya. Adapun instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah daftar *check-list* klasifikasi bahan penelitian berdasarkan topik dan fokus kajian. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan kebijakan-kebijakan dalam Kurikulum Merdeka, yaitu: 1) mengganti USBN dengan penilaian kompetensi siswa. Asesmen ini berupa tes tulis, portofolio dan penugasan kelompok seperti karya tulis; 2) menghapus Ujian Nasional digantikan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang disusun oleh pihak sekolah; 3) penyederhanaan RPP; 4) peraturan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) lebih fleksibel; 5) asistensi mengajar di satuan pendidikan untuk menambah pengalaman kerja bagi mahasiswa. Agar dapat terealisasikan tujuan mulia Kurikulum Merdeka ini, dibutuhkan dukungan dari seluruh *stakeholder* pendidikan, orang tua, dan masyarakat. Selain itu, perlunya pelatihan secara berkala bagi guru untuk meningkatkan kesiapan implementasi Kurikulum Merdeka.

Kata kunci: kurikulum merdeka; kurikulum 2013; kebijakan pendidikan

ABSTRACT

This curriculum emphasizes enjoyable and burden-free learning. Each learning process is expected to be differentiated to accommodate the diversity of students' interests and talents. In this study, the method used was literature research. The data collection technique involved searching for information related to the research focus through notes, books, scientific articles, and other relevant sources. The research instrument used by the researcher was a checklist of research materials based on the topics and focus of the study. This study's findings are: 1) replacing the National Final Examination (USBN) with competency assessments for students. This assessment consists of written tests, portfolios, and group assignments such as essays; 2) eliminating the National Examination and replacing it with Minimum Competency Assessment and Character Survey developed by schools; 3) simplifying lesson plan; 4) more flexible zoning regulations for new student admission; 5) teaching assistance in educational units to provide work experience for students. In order to achieve the noble goals of the Merdeka Curriculum, support from all educational stakeholders, parents, and the community is needed. In addition, periodic training for teachers is necessary to improve readiness for implementing the Merdeka Curriculum.

Keywords: merdeka Curriculum, 2013 Curriculum, education policy

PENDAHULUAN

Kurikulum di Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan yang ada. Tidak heran kurikulum di Indonesia sering mengalami pergantian atau perubahan. Pada dasarnya, perubahan ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah tanpa dapat dicegah.

Pada tahun ajaran 2013-2014, pemerintah telah mengesahkan sebuah kurikulum yaitu Kurikulum 2013. Kurikulum ini dibuat dalam rangka menyempurnakan kurikulum sebelumnya, yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pada Kurikulum 2013, pendidikan tidak hanya berfokus untuk meningkatkan kualitas akademis semata, tetapi juga pendidikan karakter bagi peserta didik (Julaeha, 2019).

Pada praktiknya di lapangan, implementasi Kurikulum 2013 tentu tidak selalu berjalan mulus. Sebelum diberlakukannya Kurikulum 2013 pada tahun ajaran baru 2013/2014, terjadi gelombang kritik dari berbagai pihak terhadap pemberlakuan Kurikulum tersebut. Pasalnya, kebijakan-kebijakan yang ada pada Kurikulum 2013 dianggap kurang bersesuaian dengan tujuan pendidikan (Ahmad, 2014).

Beberapa pihak yang mengajukan penolakan atas pemberlakuan Kurikulum 2013, di antaranya a) *Indonesia Corruption Watch* (ICW); b) Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ); Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI); dan d) Aliansi Revolusi Pendidikan (Anam, 2020). Alasan pihak-

pihak tersebut menggelar penolakan antara lain disampaikan oleh Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, pihak mereka mengusung isu penghentian Ujian Nasional (UN) dan penghapusan komersialisasi pendidikan (Ahmad, 2014). Retno berpendapat bahwa pemberlakuan Kurikulum 2013 yang dianggarkan akan menghabiskan Rp 2,49 triliun hanya akan terjadi pemborosan uang negara.

Sebagai tanggapan atas kritik terhadap Kurikulum 2013, pemerintah Indonesia mengkaji berbagai masukan yang telah diterima. Setelah diberlakukannya Kurikulum 2013, ternyata masih terdapat banyak kendala yang memengaruhi hasil belajar siswa, baik dari segi media yang digunakan maupun penilaian yang lebih rumit dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi pembelajaran masih belum efektif (Firdaus et al., 2022).

Pada tahun 2019, pemerintah mengumumkan pengembangan kurikulum baru yaitu Kurikulum Merdeka atau sering disebut dengan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar merupakan bagian dari kebijakan baru yang dicetuskan oleh menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi "Nadiem Makarim" pada tahun 2019 (Marisa, 2021).

Pelaksanaan Kurikulum Merdeka mengacu pada Keputusan Mendikbudristek No. 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum

dalam rangka pemulihan pembelajaran (Kurikulum Merdeka) sebagai penyempurna dari kurikulum sebelumnya (Nugraheni & Siswanti, 2022). Di dalamnya terdapat beberapa perubahan kebijakan serta munculnya istilah-istilah baru yang konsepnya tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep yang ada pada Kurikulum 2013. Adapun tulisan ini bertujuan untuk memaparkan perubahan kebijakan dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* (studi kepustakaan). Metode ini berkaitan dengan kajian teoritis yang bersumber dari referensi atau literatur-literatur ilmiah (Wekke, 2019). Penelitian kepustakaan dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan berdasarkan hasil karya tulis baik yang dipublikasikan maupun tidak (Hattarina, 2022).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu mencari informasi terkait fokus kajian melalui catatan, buku, artikel ilmiah dari berbagai jurnal dan sumber relevan lainnya. Adapun instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah daftar *check-list* klasifikasi bahan penelitian berdasarkan topik dan fokus kajian, seperti latar belakang perubahan Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka; kelebihan dan kekurangan Kurikulum 2013; kelebihan dan kekurangan Kurikulum Merdeka; dan

kebijakan-kebijakan yang berubah dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini sebagai berikut: 1) peneliti menyiapkan ide atau topik penelitian; 2) menyusun daftar *check-list* klasifikasi bahan penelitian berdasarkan fokus kajian; 3) menyusun informasi dari berbagai literatur seperti artikel ilmiah, buku dan dokumen yang relevan; 4) peneliti mempertegas fokus penelitian yaitu perubahan kebijakan dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka; 5) membaca dan menyusun catatan penelitian; 6) melakukan pengayaan bahan bacaan; 7) menuliskan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kurikulum 2013, pada awal pemberlakuannya banyak menuai kritik dari berbagai pihak, salah satunya dari Koordinator Monitoring Kebijakan Publik ICW, Febri Hendri. Ia mengemukakan bahwa pihaknya mengajukan delapan petisi yang menjadi alasan penolakan berlakunya Kurikulum 2013 (Anam, 2020), antara lain: 1) pemerintah ditengarai mengabaikan evaluasi terhadap Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagai kurikulum yang akan diganti; 2) proses perumusan kebijakan terkesan terburu-buru dan memaksakan; 3) mekanisme perubahan kurikulum tidak mengacu pada SNP (Standar Nasional Pendidikan); 4) target *training master teacher* ditengarai terlalu ambisius,

sementara buku cetak guru yang dijanjikan sebelumnya belum juga dicetak; 5) Kurikulum 2013 cenderung mematkan kreativitas guru serta kurang mempertimbangkan aspek budaya lokal. Hal ini karena guru tidak perlu lagi menyiapkan silabus dan sudah disediakan sepaket dengan kurikulum. Namun isi silabus yang diberikan kepada guru seluruhnya sama, tanpa mempertimbangkan keberagaman budaya lokal; 6) anggaran Kurikulum 2013 mencapai angka yang fantastis, yaitu sebesar Rp 2,49 triliun. Adapun setengahnya yaitu sebesar Rp 1,3 triliun akan dialokasikan untuk pengadaan buku yang tentu saja berpotensi dikorupsi; 7) pengadaan buku yang dicanangkan pemerintah merupakan proyek pemborosan. Pasalnya setiap tahun sejak 2008, pemerintah telah aktif membeli hak cipta buku elektronik (BSE); serta 8) pemerintah belum mengeluarkan dokumen kurikulum resmi. Tentu hal ini menjadi polemik, bagaimana proyek penyusunan buku akan dilakukan jika dokumen Kurikulum 2013 saja belum resmi.

Menurut Sakhyya (2013), kebijakan kurikulum yang sepaket dengan silabus, dianalogikan sebagai sebuah pakaian yang berukuran sama. Tentunya, ukuran pakaian tersebut tidak akan sesuai untuk dipakai semua orang, karena ukuran pakaian orang berbeda-beda. Dengan adanya kebijakan ini, guru tidak dipercaya untuk berkreasi dalam mengembangkan kurikulum berdasarkan kebutuhan

kontekstual dan keberagaman budaya setempat (Firdaus et al., 2022).

Sebagai tanggapan atas kritik terhadap Kurikulum 2013, pemerintah Indonesia mengkaji berbagai masukan yang telah diterima. Akhirnya, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81A Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum, Kurikulum 2013 diluncurkan. Strategi implementasi yang dilakukan pemerintah menggunakan pedoman implementasi kurikulum yang mencakup: a) pedoman penyusunan dan pengelolaan kurikulum tingkat satuan pendidikan; b) pedoman umum pembelajaran; c) pedoman pengembangan muatan lokal; d) pedoman kegiatan ekstrakurikuler; dan e) pedoman evaluasi kurikulum (Anam, 2020).

Pembahasan

Setiap kurikulum yang diberlakukan tentunya tidak terlepas dari kelebihan dan kelemahan, begitupun pada Kurikulum 2013. Setelah diberlakukannya Kurikulum 2013, ternyata masih terdapat banyak hal yang harus dibenahi, mulai dari isi, kemasan dan masalah guru (Ahmad, 2014)

Menurut Ahmad (2014), beberapa kebijakan yang menjadi kelemahan Kurikulum 2013, yaitu membuang sains dengan menambah muatan pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama. Sedangkan sains atau IPA akan dilebur ke dalam dua mata pelajaran tersebut. Harapan Muhammad Nuh selaku

Mendikbud saat itu, berharap penambahan dua jam mata pelajaran agama akan membantu program pembasmian terorisme.

Tidak hanya sains, terdapat beberapa mata pelajaran lain yang ikut dileburkan bahkan dihilangkan, seperti mata pelajaran Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes) serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Ketiganya akan digeser menjadi kegiatan ekstrakurikuler dan bukan lagi mata pelajaran (Firdaus et al., 2022). Sangat disayangkan, seharusnya mata pelajaran Bahasa Inggris menjadi jembatan pendidikan dalam membentuk peserta didik yang siap bersaing di tingkat global. Untuk itu, siswa penting dikenalkan Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Sejumlah mata pelajaran yang diintegrasikan atau dilebur tersebut dapat berpotensi terjadinya pengurangan jumlah guru. Bahkan di sekolah penyusun, guru-guru yang menguasai mata pelajaran Bahasa Inggris, TIK dan penjaskes harus beralih mengajar mata pelajaran lain agar tetap mendapat jam mengajar.

Dalam rangka menyiapkan implementasi Kurikulum 2013, pemerintah saat itu berencana membekali guru melalui pelatihan dengan beban belajar 52 jam dan sesi mentoring selama beberapa bulan pertama di tahun ajaran 2013-2014. Menurut Retno Listyarti (Ahmad, 2014), sulit untuk mengajarkan dan memaksa guru menerapkan kurikulum baru. Pelatihan selama 52 jam dirasa terlalu

singkat dan tidak memadai untuk menyiapkan guru yang terampil dalam mengaplikasikan materi pelatihan terkait Kurikulum 2013. Menerapkan kurikulum baru bukanlah pekerjaan yang mudah. Guru menjadi ujung tombak dalam mengimplementasikan sebuah kurikulum, seharusnya guru betul-betul diberikan waktu dan ruang yang sesuai agar kompetensinya meningkat dan siap menjadi garda terdepan dalam menerapkan kurikulum baru.

Seiring bergantinya kabinet pemerintahan dan berganti pula Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (saat ini Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi), tidak jarang kebijakan kurikulum pun ikut berganti. Pada tahun 2019, Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek mengumumkan pengembangan kurikulum baru yaitu Kurikulum Merdeka atau sering disebut dengan Merdeka Belajar (Marisa, 2021). Pelaksanaan Kurikulum Merdeka mengacu pada Keputusan Mendikbudristek No. 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran (Kurikulum Merdeka) sebagai penyempurna dari kurikulum sebelumnya (Nugraheni & Siswanti, 2022).

Konsep merdeka belajar atau belajar yang merdeka telah menjadi topik yang sudah lama dibahas oleh para penggiat pendidikan. Kurikulum Merdeka Belajar dianggap sebagai inovasi baru dalam dunia pendidikan. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat pendidikan

karakter, kreativitas, kewirausahaan, dan keunggulan lokal berlandaskan Pancasila (Hattarina, 2022).

Pada dasarnya, kurikulum Merdeka menghidupkan kembali nilai-nilai pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro (Irawati et al., 2022). Ki Hajar Dewantoro menekankan tentang kemerdekaan belajar dan pembelajar sepanjang hayat. "...kemerdekaan hendaknya dikenakan terhadap caranya anak-anak berpikir, yaitu jangan selalu dipelopori, atau disuruh mengakui buah pikiran orang lain, akan tetapi biasakanlah anak-anak mencari sendiri segala pengetahuan dengan menggunakan pikirannya sendiri" (Hendri, 2020).

Merdeka Belajar memiliki tujuan yang luhur dalam mewujudkan cita-cita bangsa terhadap generasi muda (Putra, 2019). Sebagaimana manusia yang merdeka, Kurikulum Merdeka dapat dimaknai sebagai Kurikulum yang memiliki komitmen untuk mengakui bahwa semua peserta didik memiliki keberagaman. Peserta didik yang satu akan berbeda dengan peserta didik lainnya, salah satunya dalam hal minat-bakat.

Pembelajaran pada Kurikulum Merdeka dilakukan dengan memperhatikan bakat alami yang mereka punya, tanpa memaksa mereka mempelajari atau menguasai suatu bidang pengetahuan di luar hobi dan kemampuan mereka (Widyastuti, 2022.). Dengan begitu, masing-masing mereka mempunyai portofolio yang sesuai dengan

kegemarannya. Kemerdekaan atau kebebasan yang dimaksud ialah tetap mengekspresikan proses belajar pada batas-batas yang ada tanpa melunturkan cita-cita luhur pendidikan.

Sebagaimana prinsipnya, Merdeka Belajar dimaksudkan untuk menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa beban akibat tuntutan pencapaian (Marisa, 2021). Kurikulum merdeka dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pendidikan yang berlandaskan pada kebebasan, keadilan, keberagaman, dan partisipasi (Hattarina, 2022).

Salah satu yang menjadi dasar dari Kurikulum Merdeka ialah heterogenitas. Heterogenitas atau keberagaman peserta didik masih menjadi permasalahan yang kurang mendapatkan perhatian, sehingga berdampak pada rendahnya hasil belajar peserta didik (Mulbar et al., 2017). Peserta didik memerlukan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi dari pendidik. Ki Hajar Dewantara menyatakan, tidak baik menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak bisa diseragamkan dan harusnya difasilitasi dengan bijak (Puspitasari et al., 2020).

Pembelajaran berdiferensiasi yaitu penyesuaian terhadap minat, kesiapan belajar serta gaya belajar setiap peserta didik agar tercapai peningkatan hasil belajar (Khasanah & Alfiandra, 2023). Pembelajaran yang berdiferensiasi bukan berarti setiap pembelajaran diindividualkan. Berdiferensiasi berarti mengakomodir kekuatan dan kebutuhan

belajar siswa dengan strategi pembelajaran yang independen. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi baik internal maupun eksternal dan hasil belajar setiap peserta didik, sehingga terjadi perubahan tingkah laku.

Strategi berdiferensiasi sangat diutamakan dalam Kurikulum Merdeka agar pendidik dapat memfasilitasi siswa dengan metode dan pendekatan yang sesuai. Oleh karenanya, pendidik perlu memperhatikan latar belakang siswa dari berbagai sisi, baik dari gaya belajar, lingkungan tempat siswa bertumbuh dan berkembang, ataupun minat bakat siswa yang berbeda-beda. Untuk merancang strategi berdiferensiasi, hal utama yang perlu dilakukan ialah asesmen awal melalui observasi, refleksi, wawancara peserta didik dan orang tua, serta berbagai macam asesmen lainnya yang sesuai (Khasanah & Alfiandra, 2023).

Selain asesmen awal, bentuk penilaian akhir dalam Kurikulum Merdeka tidak hanya berfokus pada sebuah perankingan (Santosa, 2022). Kebijakan Kurikulum Merdeka lebih menekankan kepada bakat dan kecerdasan setiap peserta didik, sehingga peserta didik akan lebih cakap serta memiliki kompetensi dengan moral yang tinggi dan dapat berguna bagi masyarakat.

Nadiem Makarim membuat kebijakan Merdeka Belajar didasarkan pada penelitian *Programme for Internasional Student Assesment* (PISA) pada tahun 2019. Hasil peneelitian ini

menunjukkan bahwa peserta didik Indonesia menempati posisi keenam terbawah yaitu posisi 74 dari 79 negara dalam bidang matematika dan literasi (Hasim, 2020).

Sedangkan dalam penilaian kemampuan matematika dan sains, Indonesia menempati peringkat ke 73 dan ke 71 dari 79 negara partisipan (Hewi & Shaleh, 2020). Hasil tersebut terbilang konsisten menjadikan Indonesia pada posisi terbawah. Hal ini membawa konsekuensi pemikiran bahwa Indonesia memiliki kualitas pendidikan yang tidak sesuai dengan standar masyarakat global.

Menyikapi hasil penelitian di atas, maka Nadiem Makarim mencetuskan penilaian dalam mengukur kemampuan minimum yang meliputi literasi, numerasi serta survei karakter. Literasi tidak hanya dimaknai sebagai pandai membaca teks, tetapi juga dalam menganalisis bacaan. Adapun numerasi yang dimaksud ialah kemampuan untuk menerapkan konsep numerik dalam kehidupan nyata, bukan hanya sekadar nilai pelajaran matematika (Marisa, 2021).

Dalam rangka memaksimalkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, maka indikator dalam *Programme for Internasional Student Assesment* (PISA) mulai diajarkan pada lembaga pendidikan anak usia dini. Adapun indikator yang dipelajari tersebut seperti literasi membaca dalam berbagai pilihan metode dan media, literasi *math fun* (matematika yang menyenangkan), serta

kegiatan sains eksploratif dengan melibatkan anak pada kegiatan percobaan sederhana (Hewi & Shaleh, 2020).

Merdeka belajar menekankan proses pembelajaran pada pembentukan karakter siswa yang berani, mandiri, santun, beradab dan dapat beradaptasi dengan perubahan (Hasim, 2020). Dalam melaksanakan proses belajar, guru dan siswa diharapkan mampu berkomunikasi dengan baik melalui proses diskusi dan curah pendapat, sehingga suasana belajar akan lebih hidup dan siswa dapat merasa terfasilitasi pendapatnya. Oleh karena itu, dalam Kurikulum Merdeka guru diharapkan mampu menyampaikan materi dengan mengaitkan pada pembentukan karakter peserta didik.

Keunggulan Merdeka Belajar tidak hanya ditujukan bagi peserta didik dalam mengambil inisiatif ketika proses pembelajaran, memfasilitasi anak untuk belajar sesuai dengan minat dan bakatnya, serta mendorong anak untuk mengembangkan keterampilan sosial dan kepemimpinan (Kurniati et al., 2022). Kebebasan atau keleluasaan juga ditujukan kepada guru dalam memilih perangkat ajar yang beragam sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik (Purnawanto, 2022).

Meskipun Merdeka Belajar memiliki konsep memerdekakan pendidik dan peserta didik, namun konsep Merdeka Belajar masih sering dipahami sebagai yang “mudah diucapkan namun sulit untuk

dipraktikkan” (Nugraheni & Siswanti, 2022). Dalam implementasi Merdeka Belajar berkaitan erat dengan tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu komitmen, kemandirian dan kemampuan pengimplementasian (Amalia, 2022).

Komitmen ialah awal dari tercapainya tujuan pendidikan yang telah dituangkan dalam undang-undang pendidikan nasional. Adapun kemandirian berperan sebagai landasan dalam mencapai tujuan. Namun hal ini menjadi kendala besar karena pemahaman pendidik terhadap Kurikulum Merdeka masih dalam taraf cukup dan memerlukan pengembangan secara berkala. Selain itu, pendidik masih dalam masa penyesuaian dengan perubahan dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka (Nugraheni & Siswanti, 2022). Dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara efektif, tentunya dibutuhkan dukungan dan kesiapan dari seluruh *stakeholder* pendidikan, seperti guru, orang tua, dan masyarakat.

Dalam Kurikulum Merdeka terdapat istilah-istilah baru yang perlu dipahami oleh setiap pelaksana pendidikan, misalnya istilah “dimensi”. Dimensi ini merupakan fokus utama dari Kurikulum Merdeka (Alimuddin, 2023). Adapun dimensi Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka, yaitu 1) dimensi Beriman, Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia. Adapun elemen kunci dari dimensi ini adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia,

akhlak kepada alam dan akhlak bernegara. 2) dimensi Berkebhinekaan Global. Elemen kunci pada dimensi ini adalah mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antarbudaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, serta berkeadilan sosial.

Adapun dimensi 3) Bergotong Royong. Elemen kunci pada dimensi ini antara lain kolaborasi, kepedulian dan berbagi. 4) dimensi Mandiri, dengan elemen kunci pemahaman diri dan situasi yang dihadapi dan regulasi diri. 5) dimensi Bernalar Kritis, dengan elemen kunci memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksikan dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. 6) dimensi Kreatif, elemen kunci pada dimensi ini adalah menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, memiliki keluwesan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan.

Tidak hanya muncul istilah "dimensi" untuk menggambarkan fokus Kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum ini terdapat istilah-istilah baru untuk menggantikan istilah lama dengan konsep yang tidak jauh berbeda. Misalnya, KOSP. Konsep Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) tidak jauh berbeda dengan dokumen KTSP pada K13. Terdapat 4 (empat) komponen utama dalam menyusun KOSP, yaitu karakteristik satuan pendidikan; visi, misi, dan tujuan;

pengorganisasian pembelajaran; dan perencanaan pembelajaran (Merliza, 2022).

Istilah Alur Tujuan Pembelajaran (ATP). ATP ialah serangkaian tujuan pembelajaran yang sistematis dan juga logis dalam fase capaian pembelajaran secara utuh dari fase awal hingga akhir berisikan modul ajar atau rencana pembelajaran (Kuswiyati, 2023). Di dalamnya terdapat tema, subtema, materi, soal, pengayaan, penilaian, refleksi dan remedi (Ardianti & Amalia, 2022). Dalam Kurikulum 2013 (K13), ATP biasa disebut dengan silabus.

Istilah berikutnya ialah Capaian Pembelajaran (CP). CP merupakan kompetensi minimum yang harus dicapai peserta didik (Purnawanto, 2022). Perancangan CP masih berkaitan erat dengan Taksonomi Bloom yang semula digunakan dalam K13. Istilah CP dalam K13 ialah KI-KD.

Istilah lain ialah Fase. Fase menunjukkan tingkat kompetensi setiap peserta didik terhadap suatu pembelajaran (Rahmadayanti & Hartoyo, 2022). Adapun fase-fase dalam Kurikulum Merdeka yaitu, 1) fase fondasi yang diperuntukkan untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 2) fase A bagi kelas 1-2 SD; 3) fase B bagi kelas 3-4 SD; 4) fase C bagi kelas 5-6 SD; 5) fase D bagi kelas 7-9 SMP dengan beban belajar dan alokasi berbeda; 6) fase E bagi jenjang SMA/SMK/ sederajat di kelas 10; 7) fase F bagi kelas 11 dan 12 di tingkat SMA/SMK/ sederajat. Fase-fase tersebut

berlaku tidak hanya dalam satuan pendidikan biasa, tetapi juga berlaku di Sekolah Luar Biasa (SLB) sesuai dengan tingkatan pada sekolah biasa.

Dalam menerapkan Kurikulum Merdeka di satuan pendidikan. Pemerintah membebaskan pengelola untuk memilih opsi Kurikulum Merdeka berdasarkan kesiapan sekolah dalam mengimplementasikannya (Widyastuti, n.d.). Tingkat kesiapan ini sebelumnya akan disurvei melalui alur pendaftaran Kurikulum Merdeka secara *online*. Sebelum memilih opsi mana yang akan diterapkan, akan muncul beberapa pertanyaan pada laman awal pendaftaran *online* tentang kesiapan responden agar tidak salah menentukan opsi untuk diterapkan disatuannya.

Terdapat tiga opsi Kurikulum Merdeka, yaitu Merdeka Belajar, Merdeka Berubah dan Merdeka Berbagi (Maulida, 2022). Merdeka Belajar bisa dipilih oleh sekolah yang memang belum siap mengimplementasikan Kurikulum Merdeka di tahun ajaran 2022 atau 2023. Sekolah boleh menerapkan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum yang sudah dipakai. Praktiknya dapat diterapkan di jenjang PAUD; jenjang SD kelas 1 dan kelas 4; jenjang SMP kelas 7; dan jenjang SMA kelas 10.

Opsi Merdeka Berubah dapat dipilih oleh sekolah yang sudah siap menerapkan Kurikulum Merdeka, terutama bagi sekolah yang memiliki guru penggerak dan pengajar praktik (Rahmadayanti & Hartoyo,

2022). Adapun opsi Merdeka Berbagi dapat dipilih oleh sekolah yang secara fasilitas, tenaga pendidik dan kependidikan sudah siap untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Opsi ini memiliki tugas tambahan untuk setiap sekolah yang sudah mampu berbagi untuk melaksanakan 'praktik baik' kepada sekolah lain yang masih dalam tahap belajar. Berbagi praktik baik diutamakan bagi sekolah yang sudah menjadi sekolah penggerak karena sudah mendapatkan pelatihan sekaligus menerapkan Kurikulum Merdeka di satuannya.

Terdapat kebijakan-kebijakan baru dalam Kurikulum Merdeka untuk semua jenjang dari PAUD hingga Perguruan Tinggi. Pada jenjang PAUD, Kurikulum Merdeka mendorong guru untuk memberikan kesempatan eksplorasi mandiri maupun berkelompok kepada peserta didik melalui berbagai pilihan kegiatan atau pilihan main, atau dikenal juga sebagai merdeka bermain (Shalehah, 2023). Memberikan pilihan kegiatan memungkinkan pembelajaran berdiferensiasi.

Pada jenjang SD, SMP dan SMA terdapat empat kebijakan yang digulirkan (Santosa, 2022), yaitu 1) mengganti USBN dengan penilaian kompetensi siswa. Asesmen ini dapat berupa tes tulis, portofolio dan penugasan kelompok seperti karya tulis. Guru dan sekolah diberi kebebasan dalam menilai sendiri hasil belajar siswa tanpa adanya standar seragam bagi seluruh siswa se-Indonesia;

2) menghapus Ujian Nasional. UN digantikan dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang disusun oleh sekolah; 3) penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). RPP berisi tujuan kegiatan dan asesmen pembelajaran dapat dipersingkat menjadi satu atau dua halaman tergantung kebutuhan pendidik; 4) peraturan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) lebih fleksibel. Meskipun begitu, terdapat patokan PPDB antardaerah, minimal 50% untuk siswa zonasi, minimal 15% untuk jalur afirmasi, dan 0-30% untuk jalur prestasi (Hattarina, 2022).

Adapun kebijakan Kurikulum Merdeka pada Perguruan Tinggi ialah menyediakan program-program yang bertujuan untuk menambah kompetensi dan pengalaman mahasiswa. Program tersebut antara lain, 1) pertukaran pelajar antaruniversitas atau negara dengan tujuan untuk lebih menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama dan kepercayaan; 2) magang/praktik kerja selama satu sampai dua semester; 3) asistensi mengajar di satuan pendidikan untuk menambah pengalaman kerja mahasiswa; 4) penelitian/riset; 5) pengabdian/proyek kemanusiaan; dan 6) kegiatan kewirausahaan yang bermitra dengan berbagai *stakeholder* (Widyastuti, 2).

KESIMPULAN

Implementasi Kurikulum 2013 dinilai terlalu tergesa-gesa dan belum

mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Untuk itu Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek di era pemerintahan Presiden Joko Widodo mencetuskan kebijakan baru yaitu Kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar.

Kurikulum Merdeka ialah kurikulum yang mengedepankan cara berperilaku, berpose, berpikir, berlaku kreatif untuk mengembangkan diri setiap individu dengan menentukan nasibnya sendiri. Konsep Kurikulum Merdeka dilatarbelakangi oleh pemikiran tokoh pendidikan nasional yaitu Ki Hajar Dewantara, di mana beliau berpikir setiap dari kita harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Beberapa perubahan kebijakan dalam Kurikulum Merdeka antara lain penilaian USBN komprehensi (asesmen); tidak ada lagi UN; penyederhanaan RPP; zonasi lebih fleksibel. Istilah-istilah yang ikut berubah yaitu silabus menjadi ATP; KI-KD menjadi CP; dan terdapat istilah fase untuk menggambarkan jenjang kesiapan peserta didik. Implementasi kurikulum merdeka melewati tahap sosialisasi, survei kesiapan, bimbingan teknik, praktik, evaluasi dan monitoring serta tindak lanjut perbaikan.

Dalam setiap pemberlakuan sebuah kurikulum, tentunya tidak terlepas dari kelebihan dan kelemahan. Kelebihan Kurikulum Merdeka yaitu pembelajaran berdiferensiasi bagi pendidik dan peserta didik. Meskipun begitu, memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi artinya

satuan pendidikan harus bersedia dalam hal waktu, tenaga bahkan tidak menutup kemungkinan dana yang juga tidak sedikit. Sedangkan dalam segi kelemahannya, Merdeka Belajar masih sedikit referensi implementasi Kurikulum di setiap daerah, sehingga banyak pendidik yang merasa kesulitan dalam mengimplementasikan Merdeka Belajar pada peserta didiknya. Oleh karenanya dibutuhkan dukungan berupa pelatihan secara berkala bagi guru untuk meningkatkan kesiapan implementasi kurikulum baru. Selain itu, dukungan penuh dari seluruh *stakeholder* pendidikan, orang tua, dan masyarakat sangat diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. (2014). *Problematika Kurikulum 2013 Dan Kepemimpinan Instruksional Kepala Sekolah*.
- Alimuddin, J. (2023). *Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah Dasar Implementation Of Kurikulum Merdeka In Elementary Scholl. Jurnal Ilmiah Kontekstual*, 4(02), 67–75.
- Anam, C. (2020). *Implementasi Kurikulum Pendidikan Dasar 2013. Jurnal Ats-Tsaqofi*, 2(1), 43–64.
- Ardianti, Y., & Amalia, N. (2022). *Kurikulum Merdeka: Pemaknaan Merdeka dalam Perencanaan Pembelajaran di Sekolah Dasar. Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 6(3), 399–407. <https://doi.org/10.23887/jppp.v6i3.55749>
- Firdaus, H., Hasanah, I. A., Laensadi, A. M., Matvayodha, G., & Siagian, F. N. (2022). *Analisis Evaluasi Program Kurikulum 2013 Dan Kurikulum Merdeka* (Vol. 4).
- Hasim, E. (2020). *Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Perguruan Tinggi Di Masa Pandemi Covid-19. Prosiding Webinar Magister Pendidikan Dasar Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo*, 68–73.
- Hattarina, S. S. N. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Lembaga Pendidikan. *SENASSDRA*, 1, 181–192.
- Hendri, N. (2020). *E-Tech Merdeka Belajar; Antara Retorika dan Aplikasi. E-Tech*, 8(1), 1–9. <https://doi.org/10.1007/XXXXXX-XX-0000-00>
- Hewi, L., & Shaleh, M. (2020). *Refleksi Hasil PISA (The Programme For International Student Assesment): Upaya Perbaikan Bertumpu Pada Pendidikan Anak Usia Dini. Jurnal Golden Age, Universitas Hamzanwadi*, 04(1), 30–41.
- Irawati, D., Masitoh, S., & Nursalim, M. (n.d.). *Filsafat Pendidikan Ki Hajar Dewantara sebagai Landasan Pendidikan Vokasi di Era Kurikulum Merdeka*. <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index>
- Julaeha, S. (2019). *Problematika Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Karakter. Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7(2), 157. <https://doi.org/10.36667/jppi.v7i2.367>
- Khasanah, I., & Alfiandra. (2023). *Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi Dalam Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Kelas IX di SMPN 33 Palembang* (Vol. 5).
- Kurniati, P., Lenora Kelmaskouw, A., Deing, A., & Agus Haryanto, B. (2022). Model Proses Inovasi Kurikulum Merdeka Implikasinya Bagi Siswa Dan Guru Abad 21. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(2), 408–423.
- Kuswiyati. (2023). *Pendampingan Berkelanjutan Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru*. P41.
- Marisa, M. (2021). Curriculum Innovation “Independent Learning” In The Era Of Society 5.0. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora*, 5(1), 67–78.
- Maulida, U. (2022). Pengembangan Modul Ajar Berbasis Kurikulum Merdeka Utami Maulida. In *Agustus* (Vol. 5, Issue 2). <https://stai-binamadani.ejournal.id/Tarbawi>

- Merliza, P. (2022). Pelatihan Materi Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan Bagian 1 bagi Komite Pembelajaran Sekolah Penggerak Angkatan 2. *Journal of Technology and Social for Community Service (JTSCS)*, 2(2), 233–241.
- Mulbar, U., Bernard, H., & Pesona, R. R. (2017). Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Strategi Pembelajaran Diferensiasi pada Peserta Didik Kelas VIII. In *Issues in Mathematics Education* (hal (Vol. 1, Issue 1). <http://www.ojs.unm.ac.id/imed>
- Nugraheni, D., & Siswanti, H. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah Penggerak SD Negeri 2 Pogung Kabupaten Klaten. *Jurnal Pendidikan Ipa Veteran*, 6(1), 2022. <https://doi.org/10.31331/jipva.v6i1.2575>
- Purnawanto, A. T. (2022). Perencanaan Pembelajaran Bermakna Dan Asesmen Kurikulum Merdeka.
- Puspitasari, V., Adi Walujo, D., Pascasarjana, P., & PGRI Adi Buana Surabaya, U. (2020). Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dengan Model Diferensiasi Menggunakan Book Creator Untuk Pembelajaran Bipa Di Kelas Yang Memiliki Kemampuan Beragam.
- Putra, P. H. (2019). Tantangan Pendidikan Islam dalam Menghadapi Society 5.0 (Vol. 19, Issue 02).
- Rahmadayanti, D., & Hartoyo, A. (2022). Potret Kurikulum Merdeka, Wujud Merdeka Belajar di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 7174–7187. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3431>
- Santosa. (2022). Fenomena Kurikulum Merdeka Belajar Dalampemanfaatan Digitalisasi Di Era 5.0. <https://jetbis.al-makkipublisher.com/index.php/al/index>
- Shalehah, N. A. (2023). Konsep Kurikulum Merdeka Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Ilmiah Cahaya PAUD*, 5(1), 70–81.
- Wekke, I. S. (2019). Metode Penelitian Ekonomi Syariah. <https://www.researchgate.net/publication/344211215>
- Widyastuti, A. (n.d.). Merdeka Belajar dan Implementasinya, Merdeka Guru-Siswa, Merdeka Dosen Mahasiswa, Semua Bahagia.